

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### 1.1 Latar Belakang

Partisipasi politik sangat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi politik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat diwujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik.

Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi. Demokrasi sendiri diartikan sebagai sistem yang menekankan pada partisipasi masyarakat dalam berbagai persoalan. Demokrasi merupakan salah satu istilah yang paling dikenal rakyat Indonesia disamping istilah politik, walaupun tidak semua lapisan masyarakat kita mampu menggunakan istilah itu dalam pergaulan sehari-hari. Kata demokrasi itu telah menjadi bagian dari kehidupan politik mereka. Demokrasi ialah kekuasaan yang berasal dari rakyat (Samsuddin, 1989). Definisi demokrasi menurut kamus adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih dalam sistem pemilihan yang bebas. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Sunarso, 2015).

Menurut aturan besar, demokrasi adalah bentuk politik langsung atau tidak langsung dari pemerintahan, mayoritas warga negara ini memilih melalui forum dan memilih mereka secara bebas dan tanpa paksaan. Demokrasi adalah sistem di mana pengambil keputusan kolektif dipilih dan kandidat atau partai politik dapat bersaing secara bebas untuk memenangkan suara rakyat dan

rakyat pun memiliki hak untuk dapat ikut berpartisipasi di dalamnya. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, demokrasi itu sendiri memiliki dua aspek yaitu kompetisi dan partisipasi.

Di Negara dengan sistem politik demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda negara menjadi suatu hal yang sangat penting. Dengan adanya keterlibatan secara aktif dari masyarakat tentunya dapat menggambarkan kualitas dari sistem demokrasi tersebut. Dengan kata lain, di Negara demokrasi, partisipasi masyarakat menjadi salah satu acuan sejauh mana sistem demokrasi dapat diberlakukan dalam menentukan setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Menurut Charles Castelo yang dikutip Yuningsih menjelaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang kewenangannya dibatasi hukum sedangkan ciri dalam program dan kebijakan pemerintahan demokrasi adalah mengedepankan dalam melindungi hak-hak perorangan warga negara (Irawan & Numantoro, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi harus bisa dipandang secara luas dengan berbagai indikator pendukung yang dapat menjadi penunjang dalam melaksanakan demokrasi. Seperti keberagaman, kebhinekaan, kesetaraan gender, lingkungan hidup dan partisipasi politik masyarakat luas yang menjangkau hak-hak politik masyarakat secara luas, termasuk masyarakat adat yang cenderung memiliki kerentanan dalam partisipasi politik.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan (Yalvema, 2012). Partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh masyarakat. Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu terdorong oleh keyakinan

bahwa melalui kegiatan tersebut kepentingan mereka dapat tersampaikan atau sekurangnya-kurangnya dapat diperhatikan. Dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa kegiatan mereka memiliki efek, dan efek tersebut dinamakan *political efficacy*. Pada terminologi sosiologi politik, menganggap bahwa lebih banyak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik menunjukkan bahwa pendidikan politik masyarakat telah berhasil. Karena itu, makin banyak partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan demokrasi semakin lebih baik. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dimaksud, ditunjukkan oleh banyaknya masyarakat mengikuti dan memahami masalah politik dan turut atau ingin melibatkan diri dalam berbagai kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan suatu Negara dengan mengedepankan kolektif kolegial untuk menunjang tercapainya tujuan negara. Di dalam masyarakat yang cenderung masih terkebelakang, urusan pemerintahan dan politik terkadang dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu. Umumnya para petani, buruh, dan pedagang kecil yang merupakan golongan penduduk kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya mereka juga dapat mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah yang berpihak kepadanya dengan kekuatan politik.

Partisipasi politik dapat dilihat dari dua sisi, yaitu visi penguasa (pemerintah) dan visi warga Negara. Dari visi pemerintah hakikat partisipasi politik mengandung makna sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap masyarakat (warga Negara, rakyat) dalam memberi kesempatan untuk berperan serta memikirkan masalah kehidupan Negara melalui pemilihan (dipilih) individu-individu yang akan duduk dalam lembaga kekuasaan. Masyarakat dapat menentukan pilihannya sesuai dengan kepercayaan yang mereka yakini terhadap pilihan tersebut. Sedangkan dari sudut pandang warga Negara bahwa partisipasi politik sebagai pengakuan dan dukungan Negara, sekaligus ketaatan

warga Negara terhadap pemerintah. Lebih itu sebagai ungkapan rasa cinta terhadap negaranya (Anggara, Sistem Politik Indonesia, 2013).

Partisipasi politik menyoal hubungan antara pemahaman politik, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintahan. Sehingga, partisipasi politik erat kaitannya dengan demokrasi dan legitimasi. Partisipasi politik, demokrasi, dan legitimasi memiliki kerangka hubungan yang sangat erat. Partisipasi politik dalam hubungannya dengan demokrasi berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dalam suatu pemilu misalnya partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat kepada pasangan calon yang terpilih. Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara. Selain itu, partisipasi politik juga dapat menjadi sebuah jembatan bagi masyarakat agar dapat menyampaikan setiap kepentingan kepada pemerintah dalam memutuskan setiap kebijakan.

Jika berbicara partisipasi politik, terdapat beberapa karakter dari partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat. Pertama, partisipasi yang dilakukan secara sadar karena memiliki pemahaman politik yang baik sehingga ada keinginan untuk bisa mempengaruhi pemerintah. Kedua, partisipasi yang dilakukan secara umum sering dilakukan oleh masyarakat seperti pemilu. Ketiga, partisipasi yang dilakukan karena adanya dorongan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik seperti halnya kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Jika dilihat dari uraian diatas, pada Negara dengan sistem demokrasi, partisipasi politik memiliki tempat yang sangat penting. Salah satu ciri sistem demokrasi adalah adanya keterbukaan akses dan ruang dialog serta pelibatan

seluruh lapisan masyarakat yang bersifat *participatory* dengan tujuan supaya terjadi pertukaran pemikiran, ide serta gagasan antara pemangku kebijakan dan masyarakat sipil dalam menjalankan program pemerintahan. Demokrasi harus dipandang sebagai suatu sistem yang memiliki beberapa indikator pendukung seperti halnya keberagaman, kebhinekaan, kesetaraan, lingkungan hidup dan partisipasi politik dari setiap elemen masyarakat yang dapat menjangkau setiap hak-hak politik.

Dalam dewasa ini kita mengetahui tentang beragamnya masyarakat adat yang terdapat di Indonesia. Masyarakat adat adalah kumpulan individu yang menjalankan kehidupannya dalam sebuah wilayah geografi yang memiliki ikatan sejarah dan asal-usul yang mengikat, memiliki warisan sistem pranata sosial, politik, ekonomi dan memiliki kelembagaan adat serta menjalankan hukum adat secara turun-temurun. Masyarakat adat biasanya hidup dalam relasi sosial yang mempertahankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai sakral tertentu. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat adat telah mendahului eksistensi negara beserta seperangkat hukumnya dengan menjalankan sistem kepercayaan dan kebudayaannya sebagai sebuah entitas kelompok masyarakat (Salabi, 2018). Masyarakat adat ini memiliki kecenderungan menjadi suatu kelompok masyarakat yang rentan. Yang dimaksud masyarakat rentan ini adalah kelompok yang rentan terhadap pemenuhan hak-hak politiknya yang terabaikan dan cenderung apatis terhadap proses demokrasi. Dalam kaitannya dengan partisipasi politik, masyarakat adat Suku Dayak yang merupakan salah satu kelompok masyarakat adat Sunda yang sampai saat ini masih ketat mengikuti adat istiadat, tingkat partisipasi politiknya masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan ajaran yang mereka anut serta beberapa faktor lain yang mempengaruhinya.

Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu yang berada di Kabupaten Indramayu ini adalah sekelompok komunitas lokal yang mempercayai suatu ajaran bersama dan menetap di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat ini jumlah pengikut Suku Dayak ini sekitar

sebanyak 7.000 orang dengan 90 orang merupakan murid inti. Suku Dayak ini mengklaim bahwa terbentuknya kelompok ini sebagai kelompok berbasis kepercayaan terhadap keyakinan yang mereka anut. Mereka menamai suku ini sebagai Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Suku dayak ini menganut kepercayaan terhadap keyakinan yang berbeda, pada umumnya kepercayaan atau keyakinan yang telah diakui oleh negara ini seperti Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Namun kepercayaan yang diyakini oleh mereka yaitu kepercayaan yang terdapat pada nama Suku Dayak tersebut, yang masing-masing katanya memiliki arti tersendiri.

Komunitas masyarakat Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Kabupaten Indramayu berlandaskan pada ajaran Ngaji Rasa, yang mana ajaran ini menekankan sikap mendahulukan penilaian terhadap diri sendiri sebelum melakukan penilaian terhadap orang lain dan ajaran ini menganggap bahwa segala hal yang tercipta dan terjadi adalah berasal dari alam, bukan karena kehendak Tuhan, adapun ajaran Ngaji Rasa ini dihasilkan dari renungan yang dilakukan Takmad (Kepala Suku Dayak Losarang) yang bertujuan mengajarkan kebenaran hakiki pada masyarakat, namun metode yang diajarkan bukan merupakan doktrinasi melainkan konkretisasi yaitu melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari (R, 2021). Ngaji Rasa menjadi satu konsep Kristal kepercayaan yang dipegang teguh oleh anggota Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam berperilaku politik, tidak mau berpartisipasi dalam pemilu merupakan salah satu tindakan yang mewujudkan silih asih, tidak menyakiti sesama. Nilai spiritual Ngaji Rasa menjelaskan tentang pandangan hidup Suku Dayak Indramayu yang harus memiliki rasa welas, rasa asih dan tidak menyakiti makhluk hidup di bumi ini. Salah satunya berimplikasi pada pandangan dan tindakan politik.

Dalam kaitannya dengan partisipasi politik, terkhusus pemilu, Masyarakat Adat Suku Dayak Bumi Segandu ini memiliki partisipasi politik yang sangat rendah bahkan bisa dikatakan Masyarakat Adat Suku Dayak Bumi Segandu menjadi masyarakat rentan partisipasi politik. Hal ini terjadi bukan

dikarenakan masyarakat enggan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu, bahkan menurut salah satu tokoh masyarakat dayak, mereka selalu membuka dan menerima akan setiap kegiatan politik seperti pemilu. Menurut tokoh masyarakat Suku Dayak, mereka selalu dibebaskan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam politik baik berupa kampanye politik ataupun pemilu. Akan tetapi dalam berjalannya kegiatan tersebut masyarakat adat Suku Dayak ini, harus selalu memegang teguh ajaran yang telah diturunkan oleh leluhur dalam berkehidupan. Hal ini menjadi suatu nilai penting bagi masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu dalam menjalankan kehidupan termasuk berpartisipasi dalam politik. Sehingga mengakibatkan masyarakat Suku Dayak ini memiliki kecenderungan partisipasi politik yang rendah karena mengedepankan nilai dari ajaran yang mereka anut.

Dalam relasi hubungan sosial, kelompok tersebut menganut keyakinan ajaran Ngaji Rasa yang dilarang untuk menyakiti satu sama lain dan dilarang memaksakan kehendak satu sama lain, makna ajaran tersebut didefinisikan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam proses demokrasi dan politik. Dimana mereka menganggap jika mereka memilih salah satu kontestan politik maka sudah dianggap mengingkari ajaran ngaji rasa tersebut karena telah menyakiti satu diantara kontestan politik tersebut, maka dari itu masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu memiliki kecenderungan untuk tidak ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan politik. Selain itu, beberapa masyarakat Suku Dayak masih terdapat warga yang tidak memiliki identitas kewarganegaraan yang legal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) seperti yang telah tercatat pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada. Walaupun kelompok ini tidak memiliki identitas yang legal seperti kutipan diatas, namun masih menganggap bahwa mereka adalah sebagai bagian dari Negara Indonesia. Hanya saja mereka memiliki perspektif lain dalam memandang cara hidup. Bagi kelompok ini, KTP adalah sesuatu yang

menyusahkan. Namun mereka berkeyakinan bahwa ciri khas kelompoknya yang selalu melekat padanya, itulah sebagai tanda pengenal mereka yang sesungguhnya. Padahal jika kita lihat dari segi fungsi KTP itu tersendiri, merupakan suatu identitas yang menjadi administrasi Negara agar warganya dapat memiliki akses untuk bisa mendapatkan hak nya, baik berupa hak berkehidupan maupun berdemokrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat adat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat adat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu. Penelitian ini di dasari oleh bagaimana partisipasi politik masyarakat Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu dalam penyaluran hak elektoral di setiap momen politik, penelitian ini akan difokuskan terhadap studi kasus perilaku kelompok masyarakat adat Dayak Hindu Buddha Bumi Segandu Kabupaten Indramayu yang bertujuan untuk menganalisa dan menggali lebih dalam perilaku masyarakat dalam berpartisipasi politik.

Maka dari beberapa hal diatas penulis memiliki ketertarikan untuk dipelajari lebih lanjut mengenai suku dayak ini yang dituangkan ke dalam usulan penelitian sebagai salah satu syarat skripsi yang berjudul **PARTISIPASI POLITIK SUKU DAYAK HINDU BUDHA BUMI SEGANDU INDRAMAYU.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Partisipasi Politik Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Losarang Indramayu.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat Suku Dayak Hindhu Budha Bumi Segandu Losarang Indramayu.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian belajar tentang keunikan suku dayak Indramayu serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa berikutnya dalam menyelesaikan fenomena yang terjadi di Suku Dayak Hindu Budha Bumi Segandu Indramayu.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi mengenai Suku Dayak Indramayu.

